

REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto., M.Si

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

ABSTRAK

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

Kata Kunci : Rekrutmen, Politik.

PENDAHULUAN

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang

diwakili. Dalam struktur dan system politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari system rekrutmen. Dengan adanya system ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan system nilai dan ideologi partai politiknya (Firmanzah, 2011).

Sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Tahun 2014 dapat dipastikan menjadi hari-hari sibuk bagi partai politik. Penyelenggara pemilu di 2014 merupakan momentum penting bagi partai politik menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, pemilu 2014 memiliki arti strategis sekaligus krusial. Strategi dalam arti, jika pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas demokrasi yang memadai atau memenuhi syarat terselenggaranya demokrasi sehingga jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun jika pemilu 2014 tidak menunjukkan kualitas yang memadai atau tidak memenuhi syarat, demokrasi itu sedang memasuki titik krusial (suasana yang tidak baik atau berjalan lancar) di mana terdapat beragam masalah yang menjadi isu untuk diatasi secara bersama.

Salah satu isu yang terjadi adalah partai politik menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan darah dengan elit politik yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai. Munculnya calon anggota legislatif

juga memunculkan banyak kritik. Bagi sebagian kalangan, mereka dianggap tidak memiliki cukup kapabilitas untuk dapat memainkan peran-peran politik yang mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Sedangkan calon yang muncul dari unsur kekerabatan dikritik karena berusaha membangkitkan dinasti politik yang berbahaya bagi masa depan partai dan sistem politik yang sehat.

Pada pemilihan umum legislatif 2009 yang dilaksanakan dikota Tanjungpinang diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu ini. Secara umum Pemilu Legislatif di Kota Tanjungpinang yang diikuti 44 parpol berjalan kondusif.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai yang ada dalam jajaran partai politik di dalam pemilihan umum di kota. Tanjungpinang tahun 2009 yang lalu. Sebagai salah satu partai politik yang mempunyai nama besar partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan politik kepada simpatisan dan masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. Maka strategi rekrutmen politik dan komunikasi politik yang digunakan harus tepat sasaran sehingga perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan yang diinginkan partai dalam pemilihan legislatif pada tahun 2014.

Dengan adanya latar belakang di atas, maka penulis mengambil objek penelitian pada salah satu partai besar di Indonesia yakni Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP). Alasan mengapa penulis menitik beratkan pada partai tersebut dikarenakan pergerakan PDIP sejauh ini selalu mengacu pada isu-isu dan prinsip-prinsip tertentu. Bagi mereka, isu adalah tujuan dan partai adalah alat mencapai tujuan dan sering membawa angin perubahan yang

kurang baik dalam urusan internal partai maupun dalam sistem politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan penulis memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memfokuskan penelitian mengenai "Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2014-2019 Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

KONSEP TEORITIS

1. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiarjo, 2008:160). Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008:40) ada empat fungsi partai politik.

Pertama, sarana komunikasi politik. Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*). Ketiga, sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Keempat, pengatur konflik (*conflict management*). Budiardjo menerangkan fungsi partai politik sebagai:

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sosialisasi politik (*political socialization*)
- c. Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*)
- d. Pengatur konflik (*conflict management*).

3. Rekrutmen Politik

Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Metode Rekrutmen

Berkaitan dengan metode rekrutmen, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses yaitu, Pertama, perubahan dari non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh, Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elit dan seleksi atau penetapan posisi-posisi elit yang khusus (Seligman, 1989). Relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen caleg adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota legislative, baik dari proses

penjaringan maupun penyaringan calon.

Sistem rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Geddes mengklasifikasikan menjadi empat model: Pertama, Partisanship, yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. Kedua, Meritocratic, yakni merekrut politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli. Ketiga, Compartmentalization, yakni rekrutmen politik yang berdasarkan pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. Keempat, Survival yakni rekrutmen politik yang berdasarkan balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase (Azani, 2010 :18-19).

b. Sumber Perekrutan

Sumber perekrutan adalah sumber tersedianya orang-orang yang dapat direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif, baik yang bersumber dari lingkungan internal partai maupun yang bersumber dari eksternal partai. Sumber perekrutan ini memiliki indikator sumber internal dan sumber eksternal.

Sumber internal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadicalon anggota legislatif partai yang berasal dari lingkungan internal partai, calon anggota legislatif tersebut direkrut berasal dari organisasi sayap partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Tanjungpinang serta yang berasal dari departemen dan

badan milik partai. Adapun sub indikatornya adalah organisasi sayap partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Tanjungpinang, dan departemen-departemen serta badan-badan partai.

Sumber eksternal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berasal dari luar lingkungan partai. Calon anggota legislatif tersebut ada yang berasal dari organisasi luar partai, adanya mantan kader partai lain, maupun adanya anggota atau tokoh masyarakat yang ditempatkan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang. Adapun sub indikatornya adalah berasal dari organisasi luar partai (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesional, organisasi agama dan organisasi bisnis), mantan kader partai lain dan anggota/tokoh masyarakat.

c. Cara Seleksi

Cara seleksi adalah suatu penilaian di antara calon-calon legislatif yang akan direkrut maupun ditolak untuk menjadi calon anggota legislatif partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif, partai dapat digunakan metode ilmiah ataupun non ilmiah dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah dan non ilmiah. Pertama, metode ilmiah merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan serta analisis yang matang, juga berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuan, sehingga yang akan direkrut menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Adapun

sub indikatornya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan. Kedua, metode non ilmiah, yaitu cara seleksi yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah, seperti penampilan fisik, keturunan serta tingkat usia, sehingga calon anggota legislatif yang akan direkrut hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan semata. Adapun sub indikatornya adalah penampilan fisik, keturunan dan usia.

PEMBAHASAN

1. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai PDI Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Tanjungpinang

Momentum pemilu legislatif mengharuskan partai politik melakukan rekrutmen politik untuk menseleksi kandidat yang akan diajukan sebagai calon legislatif dari partai politiknya. Sebagaimana tertuang dalam bab VII pasal 52 bagian kedua UU No. 8 tahun 2012, partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon legislatif tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal partai politik peserta pemilu.

Salah satu bentuk aspirasi masyarakat dalam perpolitikan diwujudkan dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Maka pada bab ini penulis akan menyajikan dan menganalisa data mengenai sistem rekrutmen dalam penetapan calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan DPC Kota Tanjungpinang untuk pemilu 2014.

Seleksi calon anggota legislatif oleh Partai PDI Perjuangan di Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan diatas dilaksanakan untuk memastikan tersusunnya daftar calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 yang memenuhi syarat dan ketentuan partai serta peraturan perundang-undangn

yang berlaku. Proses selesi bakal calon anggota DPRD tidak terkecuali kota Tanjungpinang oleh Partai PDI Perjuangan sebagai pelaksanaan Lima Mantap Partai, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya.

Proses rekrutmen calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan dirangkai dalam suatu tata cara penjaringan bakal calon legislatif. Berdasarkan Surat Ketetapan No. 061/TAP/DPP/III/2013 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

a. Tahap Penjaringan

DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang membuka pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada bulan Januari 2013, dan batas pengembalian formulir pendaftaran sesuai dengan Surat Ketetapan No. 061/TAP/DPP/III/2013 sebelum tanggal 15 maret 2013. Pendaftaran ini dilakukan di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara penulis menanyakan tentang siapa saja yang mencalonkan diri yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, berdasarkan hasil wawancara bahwa ada sekitar 100 orang lebih yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan yang terdiri dari pengurus DPC, PAC, dan kader partai PDI Perjuangan kota Tanjungpinang.

Namun sayangnya data akuratnya mengenai jumlah pasti yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif tersebut tidak penulis dapatkan di sekretariat DPC PDI P kota Tanjungpinang.

Dari hasil pemaparan menunjukkan bahwa untuk memperoleh data tersebut cukup sulit mencarinya karena penulis meneliti tentang rekrutmen bakal calon legislatif PDI P kota tanjungpinang di dua tahun setelah proses itu berlangsung

dan penjelasan di atas dipaparkan bahwasanya terjadi karena sekretariat tersebut juga dipakai untuk sekretariat pemenang pada Pilkada tahun lalu, sehingga arsip-arsip sulit ditemukan. Oleh sebab itu mengingat penelitian ini harus rampung, maka penulis tetap melanjutkan penelitian meski tidak mendapati data tersebut.

Proses penerimaan pendaftaran ini dilakukan oleh panitia pelaksana penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif yaitu tim verifikasi yang sudah dibentuk. Kemudian kelengkapan administrasi harus dibawa oleh para pendaftar ketika mengembalikan formulir. Selain kelengkapan administrasi diatas para bacaleg yang mendaftar juga harus memenuhi beberapa persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh PDIPerjuangan dan juga persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahapan ini tim verifikasi melakukan seleksi administratif bakal calon guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan persyaratan yang sebagaimana terkandung dalam pasal 51 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan persyaratan khusus yang di tentukan oleh Partai PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan No. 61/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bacaleg dianggap lulus berkas, maka selanjutnya bacaleg yang telah lulus kemudian mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Hasil verifikasi tersebut disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang telah lulus verifikasi diikutkan pada tahapan penjaringan.

b. Tahapan Penyaringan

Seleksi tahapan penyaringan ini para bacaleg melewati serangkaian tes dalam bentuk psikotes, wawancara serta tatap muka langsung dengan tim penguji, dimana tim penguji diturunkan langsung dari DPP PDI-Perjuangan yang bekerja sama dengan Asosiasi Psikolog Indonesia. Serangkaian tes yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan Kota Tanjungpinang bertempat di Hotel Bintan Plaza. Proses seleksi tahap penyaringan, dilakukan berdasarkan parameter penilaian bacaleg yang ditetapkan oleh DPP, tujuan dari parameter tersebut adalah guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai visi misi, program perjuangan partai, serta dapat memberi nilai tambah bagi kemenangan partai dalam pemilu, dan dapat menjadi wakil rakyat yang baik, peka, peduli dan menguasai permasalahan rakyat baik secara nasional maupun di daerah pemilihannya.

Penyaringan dilakukan di setiap tingkatan dewan pimpinan partai melalui rapat pleno. Pada tahapan ini bakal calon akan di melakukan serangkaian tes yang dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPP PDI Perjuangan. Tes tersebut berupa Psikotes, penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, penilaian terhadap bobot scoring dan tes bebas narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Partai, hasil verifikasi administrasi pada tahap penjaringan ini, hasil penyaringan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali jumlah target perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan, sebanyak-banyaknya berjumlah 100% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan seta harus memastikan memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan dari jumlah kursi setiap daerah pemilihan yang bersangkutan.

Setelah proses-proses diatas, tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring setiap bacaleg.

Keseluruhan proses seleksi tahap penjaringan diatas dilakukan dalam sidang-sidang seleksi yang dipimpin langsung oleh ketua tim seleksi, akhirnya dari beberapa bacaleg yang mendaftar maka pada seleksi tahap penjaringan ditetapkan 30 orang bacaleg yang lulus, jumlah sesuai dengan kuota caleg maksimal yang diberikan KPU bagi setiap partai politik peserta Pemilu legislatif 2014. Sedangkan untuk bakal calon yang tidak lulus tahapan penyaringan akan dicadangkan atau ditugaskan mengisi jabatan atau personalia dilembaga legislatif, eksekutif dan penugasan partai lainnya, hal tersebut tercantum pada Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Partai.

c. Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut

Bakal caleg DPRD Kota Tanjungpinang yang lolos pada tahapan penyaringan dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang selanjutnya akan dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

DCS calon anggota DPRD yang akan diusulkan ke DPP Partai harus disusun berdasarkan nomor urut. Penentuan dan penetapan nomor urut calon anggota DPRD ke dalam DCS berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Jabatan Bakal Calon Dalam Struktur Partai

Ketentuan nomor urut dalam DCS anggota DPRD dibahas pada rapat pleno. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu). Berdasarkan Pedoman Teknis Penetapan Nomor Urut dala Surat Ketetapan DPP maka Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD/DPC partai hanya mendapatkan hak untuk ditempa pada nomor prioritas dalam hal seluruh ketentuan dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi.

2. Nilai Bobot Skoring Bakal Calon

Bakal calon anggota DPRD yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari bakal calon lainnya berhak ditempatkan pada nomor urut dibawah ketua, sekretaris atau bendahara. Penyusunan nomor urut caleg berdasarkan nilai bobot scoring ini dilakukan dengan melihat peringkat nilai bobot scoring masing-masing caleg. Caleg yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari calon lainnya akan ditempatkan di nomor urut yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai caleg yang bobot scoring nya paling rendah.

Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah disusun berdasarkan nomor urut selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat mengetahui DCS yang telah disusun oleh DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Bersamaan pengumuman DCS kepada masyarakat, caleg yang masuk dalam DCS mendapat penugasan dari partai untuk melakukan sosialisasi, penggalangan dukungan dan pemetaan politik di daerah pemilihan masing-masing. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah diumumkan DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Masyarakat yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS harus menyampaikan masukan dan tanggapan tersebut secara tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang paling lambat 14 hari sebelum usulan DCS dikirim kepada DPP Partai PDI Perjuangan.

Apabila terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap caleg yang ada di DCS, maka caleg tersebut wajib memberikan klarifikasi kepada Bidang Kehormatan Partai paling lambat 7 hari setelah diterimanya masukan dan tanggapan masyarakat. Usulan DCS anggota DPRD yang telah disusun dengan nomor urut dan diputuskan dalam rapat pleno DPC selanjutnya diserahkan ke DPP melalui DPD untuk mendapatkan persetujuan. Apabila

dalam usulan DCS tidak mendapatkan persetujuan DPP, maka DPC harus melakukan perubahan dan penggantian calon dalam usulan DCS tersebut.

2. Model Perekrutan Calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaikbaiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara (Putra, 2003:19).

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber mengenai persyaratan yang diberikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah persyaratan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD dan DPRD yang merupakan syarat untuk semua bakal calon anggota legislatif dan berlaku untuk semua partai yang mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilu legislatif pada tahun 2014.

Kemudian terdapat syarat khusus bagi bakal calon yang mendaftarkan dirinya pada Partai PDIP perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan 061/TAP/DPP/III/2013 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 seperti tes psikotes, tes bebas narkoba dan psikotropika, penugasan partai, rekam jejak pengabdian dipartai dan persyaratan yang lain yang bersifat administratif Dalam sebuah partai sejatinya memiliki penilaian khusus ataupun penilaian utama yang menjadi prioritas dalam memilih dan mengeliminasi para calon-calon anggota legislatif yang mendaftarkan diri ke partainya, dalam hal ini perekrutan calon

anggota legislatif kota Tanjungpinang dari Partai PDIP.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penilaian yang menjadi prioritas pada partai PDIP yang menjunjung prinsip loyalitas dan militan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Partai PDIP sangatlah memperhatikan nilai-nilai loyalitas para kader-kader partai baik pengurus dari DPC maupun sampai tingkat yang paling bawah dibandingkan calon yang berasal dari luar partai atau masyarakat biasa.

Perekrutan calon anggota legislatif Partai PDIP Kota Tanjungpinang tetap memberikan skala prioritas atau mengutamakan kader untuk para calon anggota legislatif partai PDIP Kota Tanjungpinang yang ingin mencalonkan diri dengan memperhatikan tingkat loyalitas para calon terhadap Partai PDIP seperti memperhitungkan lamanya bergabung dalam partai, posisi yang dijabat dalam kepengurusan partai, kontribusi yang diberikan kepada partai namun tetap memperhatikan nilai jual dari kader partai yang ingin maju dalam pemilu legislatif sebagai bentuk strategi pemenangan.

Selanjutnya partai adalah suatu organisasi yang bertujuan menciptakan kader-kader yang nantinya dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya dalam proses tersebut tidak terlepas dari pembekalan kemampuan dan kompetensi dari partai politik, ada kemampuan secara intelektual, kemampuan menjadi pemimpin, kemampuan berpolitik dan tentunya kader yang berkualitas dan berkompeten yang akan menjadi tolak ukur dalam sebuah proses kaderisasi yang baik dalam sebuah partai politik.

Berdasarkan hasil pemaparan oleh narasumber terkait kompetensi dari seorang calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang memperlihatkan suatu proses seleksi yang sangat selektif dalam perekrutan calon anggota legislatif. Hal ini ditunjukkan dari sikap partai PDIP dengan menjadikan syarat

psikotes menjadi syarat untuk lolos dalam proses seleksi bakal calon yang terdiri dari penilaian terhadap kemampuan calon terhadap pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang relevan dengan untuk menjadi seorang wakil rakyat nantinya. Dewasa ini proses perekrutan calon anggota legislatif dari sebuah partai tidak hanya diperuntukkan bagi kader-kader dari pengurus partai maupun kader dari sayap-sayap partai melainkan juga diberikan kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dari partai, namun tetap mengikuti dan mematuhi syarat-syarat yang telah diberikan partai tersebut.

Berdasarkan hasil pemaparan terkait dengan bobot penilaian dari partai PDIP terhadap calon yang berasal dari kader dan non kader menunjukkan bahwa tetap konsisten dengan prinsip loyalitas dan militannya partai PDIP Kota Tanjungpinang. Bahwasanya riwayat organisasi dan riwayat hidup juga diperhitungkan dalam proses penjarangan dan penyaringan serta memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan poin sendiri dalam proses verifikasi calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang.

Namun pada intinya partai PDIP Kota Tanjungpinang tetap terbuka terhadap siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDIP, mengingat dalam pesta demokrasi yang mempunyai pengaruh untuk menentukan siapa nantinya yang terpilih. Karena semua terpulang kepada masyarakat, karena masyarakat yang akan memilih wakilnya. Oleh karena itu penilaian dengan skala prioritas tertentu juga akan mempertimbangkan basis massa yang dimiliki bakal calon anggota legislatif.

Selanjutnya dalam sebuah pemilu legislatif, umumnya perekrutan calon-calon anggota legislatif tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan dan kepentingan dari pimpinan pimpinan partai ataupun elit-elit partai baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk strategi politik dalam memenangkan

pesta demokrasi tersebut. Melihat kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu poin dalam proses seleksi perekrutan bakal calon legislatif dari sebuah partai politik begitu juga dengan partai PDIP Kota Tanjungpinang. Berdasarkan pemaparan singkat menunjukkan bahwasanya ada pengaruh atau intervensi dari pimpinan dan elit-elit Partai di PDIP dalam penetapan calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang. Hal ini merupakan bentuk strategi pemenangan dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang.

Intruksi yang diberikan oleh pimpinan atau elit partai bukan serta merta demi kepentingan perseorangan atau kepentingan segelintir orang namun merupakan proses panjang dari pengamatan, pemetaan politik dan kecendrungan-kecendrungan lainnya sehingga perlu adanya intruksi ataupun arahan-arahan demi mencapai tujuan bersama dalam pemenangan pemilu legislatif 2014 Kota Tanjungpinang.

3. Sumber Perekrutan Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pada initya peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar/eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi. Berdasarkan hal tersebut penulis mempertanyakan bagaimana sumber perekrutan yang dilakukan partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif dari partai PDIP Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan penjelasan singkat menunjukkan bahwa sumber perekrutan yang

dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah terbuka untuk internal partai dan terbuka untuk umum dalam hal ini diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi pencalonan anggota legislatif Partai PDIP Kota Tanjungpinang. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana saluran politik yang koheren dengan kepentingan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu tidak jarang partai politik saat ini lebih terbuka dalam merekrut masyarakat yang mempunyai potensi untuk mencapai kekuasaan sebagai bentuk saling ketergantungan antara partai politik dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang mempunyai popularitas ataupun mempunyai pendukung atau basis massa yang ingin menjadi pemimpin atau wakil rakyat namun tidak memiliki “kendaraan politik” untuk mencapai kekuasaan, dan selanjutnya keterbukaan partailah yang menjadi alternatif ataupun wadah untuk merealisasikannya.

4. Cara Seleksi Rekrutmen Calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan

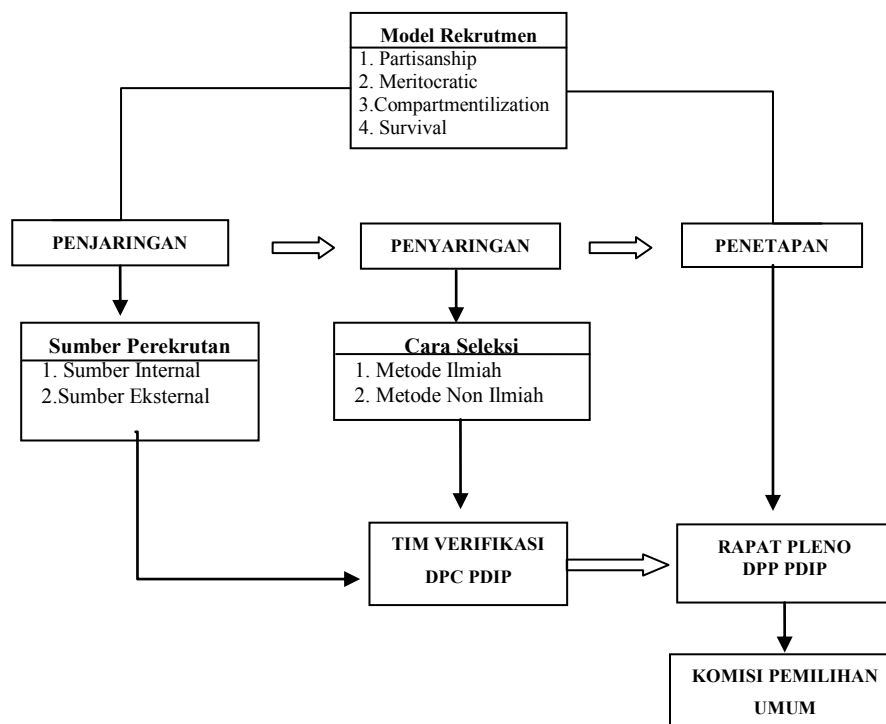
Cara seleksi adalah suatu penilaian di antara calon-calon legislatif yang akan direkrut maupun ditolak untuk menjadi calon anggota legislatif partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif, partai dapat digunakan metode ilmiah ataupun non ilmiah dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah dan non ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik ataupun cara seleksi perekrutan calon yang dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah menggunakan metode ilmiah.

Metoden ilmiah yang digunakan merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan serta analisis yang matang, juga berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan

tingkat kemampuan, sehingga yang akan direkrut menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Di dalam proses seleksi ini, partai melakukan penyaringan dari jumlah daftar nama yang mendaftar sebagai calon sementara untuk diminimalisir sesuai dengan jumlah kursi DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan oleh tim lima yang tugasnya memberikan penilaian untuk para calon sementara sebelum diserahkan ke KPUD.

Tujuan diadakannya verifikasi calon anggota legislatif adalah untuk menilai atau melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, yaitu laporan tentang prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif agar memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Gambar 1. Skema Rekrutmen Caleg PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang



KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas mengenai rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2014. Penulis akan menyimpulkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderunganpartisan. Hal tersebut terlihat dalam mekanisme skoring yang digunakan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang pada kriteria yang dimiliki oleh kader internal seperti perjuangan sejarah partai, posisi struktural di partai, sejarah pelatihan yang pernah diikuti, dan keaktifan kader. Selain itu, Partai PDIP Kota Tanjungpinang juga mempertimbangkan kecenderungan compartmentalization dan survival meskipun tidak begitu dominan. Secara umum dalam sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria yang cenderung menguntungkan calon internal, meskipun secara rekrutmen yang dilakukan Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka.
2. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal, yang artinya Partai PDIP Kota Tanjungpinang juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui secara luas terkait syarat dan prosedur yang digunakan. Secara eksplisit hal tersebut mengindikasikan Partai PDIP Kota Tanjungpinang memberikan kesempatan calon eksternal untuk masuk sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDIP Kota Tanjungpinang.
3. Partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut terlihat

dari Partai PDIP Kota Tanjungpinang melakukan rekrutmennya didasarkan aturan yang berlaku seperti uji kompetensi dan uji kesehatan yang kemudian diterjemahkan ke dalam skoring penilaian yang berisi terkait kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan calon legislatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2008. Islam dan Partai Politik. Jakarta: Pustaka At-tazkia
- Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hendrayady, Agus, dkk. 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- H. I Rahman A, 2007, Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Kencana, Inu. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Koiruddin. 2004. Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Semarang: Pustaka Pelajar
- Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli, lili. 2005. Demokrasi dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan caleg di Provinsi Banten. Jakarta: LIPI
- Scroder, Peter. 2009. Strategi Politik. Jakarta: Friedick-Nauman-Stiftung fur die freihei.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

Jurnal dan Artikel

Ariwibowo, Hendri, Budi Setiyono, Dra. Rina Martini. 2013. Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sinaga, Jimmy Commando. 2014. Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif 2014 (Studi kasus : Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra DPC Kota Medan). Sumatra Utara: USU